



STAKEHOLDERS ANALYSIS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL

STAKEHOLDER ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF POLICIES TO FOSTER AND INCREASE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN BANTUL REGENCY

Denita Methian¹, Kurnia Nur Fitriana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 15-01-24

Diperbaiki 21-01-24

Disetujui 26-01-24

Kata Kunci:

Stakeholder analysis, implementasi kebijakan, ketenagakerjaan, disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul berdasarkan *power* dan *interest*, serta mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat stakeholder dalam implementasi kebijakan. Urgensi penelitian adalah belum terdapatnya sinergi antar stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan terkait hak dan kesempatan kerja disabilitas di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sementara teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan indikator *power* dan *interest*, terdapat sembilan stakeholders yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai *key players*, Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai *context setter*, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY, LSM Ciqal, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM), Komunitas Difabelzone sebagai *subject*, serta Pemerintah Kelurahan, PT Busana Remaja Agracipta dan PT. Dong Young Tress sebagai *crowd*. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kebijakan belum mencapai tujuan secara optimal.

ABSTRACT

Keywords:

Stakeholder analysis, employment, disability, policy implementation

This research aims to analyze stakeholders in the implementation of policies for fostering and increasing employment opportunities for persons with disabilities in Bantul Regency based on power and interest, and to find out what factors are driving and inhibiting stakeholders in policy implementation. The urgency of the research is that there is no synergy between stakeholders in solving problems related to disability rights and employment opportunities in Bantul Regency. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data validity checking technique used source triangulation technique. While data analysis techniques are carried out in several stages, data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of research analyzed with indicators of power and interest, there are nine stakeholders, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul as key players, Dinas Sosial Bantul as a context setter, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD), Ciqal NGO,

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM), Difabelzone Community as subjects, and the Village Government, PT Busana Remaja Agracipta and PT Dong Young Tress as the crowd. However, in its implementation, there are still several obstacles that cause the policy to not achieve the goals optimally.

1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelegensi, dan memiliki hambatan dalam berpartisipasi dalam menjalani kehidupan. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang setara dengan individu non disabilitas lain yang harus dipenuhi. Di Indonesia, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, besaran total penyandang disabilitas di Indonesia sejumlah 28,05 juta orang. Sedangkan Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di DIY, salah satu penyebabnya adalah akibat dari bencana gempa bumi 2006. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, pada tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul sebanyak 6324 orang. Data tersebut dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Penyandang disabilitas di Bantul berdasarkan jenis cacatan

Kategori	Jenis Kecacatan	Jumlah
Mental	Psikotik	436
Sensorik	Netra	464
	Rungu wicara	437
Fisik	Eks kronis	176
	Tubuh kaki	958
	Tubuh tangan	370
	Tubuh bungkuk	186
	Tubuh kerdil	73
Intelektual	Mental retardasi	1771
Ganda	Ganda	427
N/A	N/A	1026

Sumber : Dinas Sosial DIY, 2021

Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang juga menjadi bagian dari warga negara sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil dari negara maupun masyarakat. Hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi perhatian pemerintah dalam suatu negara, karena secara hukum, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Pemenuhan hak hak penyandang disabilitas meliputi segala aspek termasuk ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan disabilitas dan menjamin hak disabilitas. Pada tingkat pusat terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Sedangkan di tingkat daerah, Kabupaten Bantul terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas.

Walaupun berbagai peraturan dan regulasi telah dikeluarkan dalam rangka mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, namun masih terdapat berbagai permasalahan. Pertama masih terdapat pengabaian kepentingan dan hak

penyandang disabilitas dan belum terdapat sinergi antar stakeholder. Contohnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 11 Tahun 2015 dalam pasal 13 berbunyi “Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak”. Namun implementasi masih jauh dari harapan, belum ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Kemudian terkait dengan rekrutmen, masih terdapat perusahaan-perusahaan di Bantul yang menyertakan kesehatan jasmani dan rohani dalam persyaratan masuk kerja, sehingga disabilitas tidak dapat mendaftar.

Kedua, di Kabupaten Bantul sendiri pekerja disabilitas di belum terserap secara maksimal. Hanya terdapat beberapa perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, seperti yang dikemukakan oleh Disnakertrans Bantul, bahwa dari total 1900 perusahaan, baru 16 perusahaan yang membuka lapangan kerja untuk disabilitas (detik.com). Perusahaan-perusahaan yang membuka rekrutmen dan menerima pendaftar kerja penyandang disabilitas antara lain PT. IGP Internasional, PT Alfamidi, PT. Qhome Sukses Abadi, PT. Busanaremaja Agracipta, PT. Dong Young Tress, PT Anggun Kreasi Garmen, PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia, dan lainnya. Masih banyaknya perusahaan yang belum mempekerjakan disabilitas disebabkan adanya anggapan bahwa disabilitas memiliki kemampuan yang kurang memadai dan produktivitas kerja yang rendah.

Permasalahan berikutnya, pada bidang pendidikan, akses penyandang disabilitas terutama di Kabupaten Bantul untuk menempuh pendidikan formal masih tergolong rendah. Sulitnya disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh penyandang disabilitas berdampak pada menurunnya peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja (Mizunoya & Mitra, 2013). Bappeda DIY dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mengeluarkan data dimana partisipasi penyandang disabilitas usia 4-18 tahun yang dalam pendidikan khusus baru mencapai 67,74%, menurun dari tahun 2022 yaitu 92,59% (bappedajogjaprov.go.id). Data tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan. Sedangkan di Kabupaten keberadaan 19 SLB dan 44 sekolah umum belum mampu menampung anak berkebutuhan khusus yang ada di hampir seluruh wilayah Bantul. Kemudian masih terdapat banyak permasalahan seperti sekolah belum memiliki guru pembimbing khusus, kurangnya keseriusan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus serta fasilitas dan sarana prasarana yang kurang mendukung keinklusion (Darmawanti, 2017). Pada hakikatnya, pendidikan merupakan faktor pendukung dalam melakukan pekerjaan. Pada pendidikan formal pemerintah memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menyediakan akses pendidikan yang layak, sedangkan pendidikan informal pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan stakeholder lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat terkait. Oleh karena itu berdasarkan data-data yang telah dipaparkan mengindikasikan bahwa pendidikan kelompok penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pengembangan keterampilan yang mempengaruhi tingkat penerimaan kerja.

Untuk merespon permasalahan tersebut diperlukan implementasi kebijakan yang inklusif. Kabupaten Bantul telah menyusun kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah bukan satu satunya aktor. Oleh karena itu pemerintah menjalin kolaborasi dengan stakeholder contohnya seperti pihak swasta/privat, lembaga swadaya masyarakat maupun *civil society*. Stakeholder menurut Freeman dalam (Wakka, 2014) berperan sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau menerima dampak dari kebijakan yang diambil. Sedangkan menurut (Bryson, 2004) mengemukakan mengkategorisasikan stakeholder menjadi dua, yaitu berdasarkan *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuasaan). Berdasarkan pemaparan kondisi diatas, meskipun telah terdapat peraturan dan kebijakan terkait disabilitas di Kabupaten Bantul, namun kondisi disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang adil. Peran masing-masing stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh dapat menjadi faktor dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karenanya perlu sebuah analisis stakeholder untuk mengidentifikasi dan menggolongkan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis stakeholder dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas terkhusus di Kabupaten Bantul.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait kebijakan disabilitas cenderung hanya dilihat dari sudut pandang satu stakeholder saja seperti perusahaan, pemerintah, maupun *civil society*. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan karena menganalisis stakeholder sesuai urgensi masalah yang ada, yang dianalisis dari perspektif pengaruh, kepentingan, hubungan serta faktor pendorong dan penghambat stakeholder. Masalah ketenagakerjaan bagi disabilitas bukan hanya tanggung jawab satu pihak melainkan banyak pihak (stakeholder), sehingga penelitian mengenai stakeholder analisis dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul menjadi salah satu penelitian yang perlu dilakukan. Permasalahan ini dikaji secara kualitatif dengan menggunakan teori stakeholder analysis menurut (Reed, 2009). Teori (Reed, 2009) menyatakan bahwa analisis stakeholder dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, mengelompokkan dan mengategorikan pemangku kepentingan, dan menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Dalam identifikasi dan pengelompokan stakeholder Reed membagi stakeholder menjadi empat berdasarkan tingkat *power* dan *interest* yaitu antara lain : (1) *Players* yaitu stakeholder yang aktif terlibat dan mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. (2) *Contest setter* yaitu stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi memiliki sedikit kepentingan dalam proses pelaksanaan kebijakan (3) *Subject* yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh yang rendah. (4) *Crowd* yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi mengenai aktivitas stakeholder dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Penelitian deskriptif yang telah dilakukan oleh peneliti dapat memberikan penjelasan secara deskriptif yaitu berbentuk kalimat mengenai *stakeholders analysis* menurut tingkat kepentingan dan pengaruh.

2.2 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, seperti pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, LSM Ciqal, Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Difabelzone, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta (YPCM), dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bantul yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Sedangkan untuk waktu penelitian mulai dari pengambilan data, pengolahan data, dan penyajian data hingga menghasilkan laporan penelitian dilaksanakan pada Juli 2023 – Desember 2023.

2.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan orang-orang yang mengetahui dan memahami mengenai kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah stakeholders antara lain : Ibu Sukirah SH,M.Ec. selaku Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Ibu Dyah Pangesti Utami, S.KM. M.SE. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Bapak Wiratma, S.Pd selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD DIY), Bapak Haryaka selaku Ketua Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD DIY), Ibu Dwi Suka selaku Direktur Yayasan CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*), Ibu Suryatiningsih Budi Lestari, S.H selaku Pendiri Yayasan CIQAL, Bapak Joko Purwadi selaku Ketua Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPPM) Bantul, Ibu Lidwina Wurie Pendiri dan Ketua Komunitas Difabelzone, serta Bapak Rahmad dan Ibu Mulyani selaku masyarakat penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan bekerja di Difabelzone Bantul.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

2.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mempertemukan dua orang atau lebih untuk saling memberikan dan bertukar informasi melalui proses tanya jawab yang nantinya dapat memberikan pemahaman terkait dengan topik tertentu (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan subjek

penelitian yaitu stakeholder di Kabupaten Bantul, untuk mengetahui jawaban secara mendalam mengenai peran stakeholder dalam implementasi pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul

2.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pada setiap peristiwa, situasi, fenomena, dan perilaku subjek penelitian secara langsung yang kemudian dicatat pada lembar observasi. Morissan (2017) mendefinisikan observasi sebagai kegiatan keseharian manusia melakukan pengamatan gejala atau objek dengan menggunakan panca indra. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara aktivitas dan peran stakeholder dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, serta mengamati bagaimana keterlibatan serta kontribusi dari masing masing stakeholder tersebut.

2.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berisi laporan serta keterangan yang dapat menjadi sumber data pendukung penelitian (Sugiyono (2014) Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumentasi yang diperoleh dari dokumen pemerintah maupun swasta. Dokumen tersebut antara lain data dari Pemerintah Daerah DIY terkait jumlah penyandang disabilitas di DIY dan Kabupaten Bantul, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terkait jumlah perusahaan yang mempekerjakan disabilitas, jumlah tenaga kerja disabilitas di perusahaan di Bantul, serta data daftar disabilitas yang mengikuti pelatihan.

2.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan langkah yang dilakukan untuk membuktikan atau menguji bahwa data bahwa yang diteliti merupakan fenomena yang benar benar terjadi. Pada penelitian kualitatif, teknik pemeriksaan keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji objektivitas (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pemeriksaan data dengan teknik uji kredibilitas, untuk membuktikan kepercayaan data dan hasil hasil penemuan dengan pembuktian. Dalam melakukan uji kredibilitas, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Tujuan dipilihnya teknik triangulasi sumber pada penelitian ini yaitu untuk membandingkan data dan mengecek kebenaran data dari berbagai sumber terkait *stakeholder analysis* dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul agar diperoleh data yang akurat

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan menyusun data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Teknik analisis data juga menggunakan analisis deskriptif yaitu proses pengolahan data dengan cara mendeskripsikan dan memberikan gambaran pada setiap sumber data penelitian

yang telah diperoleh peneliti di lapangan. Alur kegiatan pada analisis data Miles & Huberman (2014) terdiri atas:

2.6.1 Pengumpulan Data

Merupakan tahapan pengumpulan berbagai data, baik data primer maupun data sekunder. Data dikumpulkan peneliti melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara pada narasumber yang telah ditentukan yaitu stakeholder di Kabupaten Bantul yang terkait proses implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja disabilitas

2.6.2 Reduksi Data

Merupakan tahap menggolongkan dan memfokuskan data. Setelah mengumpulkan data, dilakukan reduksi data untuk mempertajam, menggolongkan, mengorganisir, memfilter data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan akhirnya dan dapat diverifikasi

2.6.3 Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, dilakukan penyajian dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data adalah menggabungkan informasi yang telah disusun agar menjadi bentuk yang padu dan dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data berbentuk naratif yaitu dengan narasi kalimat, hasil wawancara, gambar, dan tabel yang memuat informasi terkait analisis stakeholder di Kabupaten Bantul yang terkait proses implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja disabilitas.

2.6.4 Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini dilakukan verifikasi yaitu melakukan uji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan antara satu data dengan data yang lain melalui triangulasi sumber. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan melalui proses reduksi dan penyajian data sehingga informasi yang disampaikan sesuai dan menjawab rumusan masalah yaitu terkait analisis stakeholder di Kabupaten Bantul yang terkait proses implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja disabilitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat kontribusi stakeholder dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti seperti membatik, menjahit, berwirausaha serta sosialisasi peningkatan kesempatan kerja yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan LSM, swasta, dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan untuk kontribusi stakeholders berupa penyediaan informasi terkait pekerjaan bagi disabilitas melalui workshop rutin, Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan website. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antar stakeholder dalam proses pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja melalui sosialisasi dan penjalinan kerjasama dan koordinasi. Namun berdasarkan hasil penelitian belum terdapat

wewenang stakeholder untuk menyediakan suasana kerja yang inklusif terutama oleh pihak swasta, seperti tidak adanya tempat kerja yang aksesibel bagi disabilitas serta pembukaan loker yang tidak sesuai dengan kemampuan disabilitas. Terdapat sembilan stakeholders dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Stakeholders tersebut antara lain.

3.1.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Memiliki pengaruh berupa kewenangan dalam menyelenggarakan sosialisasi dan penyediaan informasi terkait tenaga kerja disabilitas melalui sosialisasi, pengumuman rekrutmen di media sosial dan website, maupun pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Disnakertrans Bantul memiliki kontribusi tinggi dalam penyelenggaraan program pelatihan keterampilan bagi disabilitas. antara lain pelatihan membuat, sablon, memasak, dan kerajinan. Kemudian Disnakertrans Bantul mempengaruhi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder lain. Kerjasama tersebut terjalin dengan LSM disabilitas untuk pelatihan, koordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk mendata disabilitas, serta dengan pihak swasta yaitu bekerjasama dengan perusahaan PT. Alfa Midi, PT.Qhome, PT. Dong Young Tress dan PT.Busanaremaja Agracipta. Disnakertrans Bantul memiliki kepentingan dengan ikut terlibat dalam proses menjembatani koordinasi swasta dengan disabilitas dan mewujudkan harapan dan kebermanfaatan kebijakan yaitu disabilitas yang memiliki keterampilan untuk bekerja

3.1.2 Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kepentingan Dinas Sosial yaitu terlibat dalam pelayanan rehabilitasi sosial dan kesehatan serta pemberian jaminan sosial untuk mewujudkan kebermanfaatan yaitu disabilitas yang berfungsi secara fisik dan sosial. Rehabilitasi dan jaminan sosial yang diberikan Dinas Sosial yaitu melalui Jamkesmas. Melalui rehabilitasi dan jamkesmas, Dinas Sosial Bantul memberikan bantuan kepada disabilitas alat bantu seperti kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar dan lainnya agar mampu mendukung disabilitas untuk melakukan pekerjaan. Namun Dinas Sosial Bantul memiliki pengaruh rendah, dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan namun hanya bersifat dasar. Kontribusi Dinas Sosial Bantul hanya pada bidang sosial, tidak berpengaruh langsung terkait kenagakerjaan dan juga tidak memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi stakeholder swasta.

3.1.3 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)

Pengaruh BRTPD DIY dalam implementasi kebijakan yaitu melakukan rehabilitasi medis, mental dan sosial serta pelatihan keterampilan. Rehabilitasi sosial yang diberikan berupa bimbingan mental sosial, *Activity Daily Living (ADL)*, bimbingan orientasi mobilitas, terapi psikososial, bimbingan sosial agama, dan bimbingan psikologi. Sedangkan rehabilitasi medis berupa

fisioterapi, pelayanan medis dasar, terapi okupasi, terapi wicara untuk disabilitas rungu, dan konseling gizi. Sedangkan kontribusi BRTPD lainnya yaitu menyelenggarakan pelatihan seperti menjahit, mengolah makanan, mendesain, membatik, *massage*, dll. BRTPD DIY terlibat dalam sosialisasi tenaga kerja disabilitas yang diselenggarakan stakeholder pemerintah. Kepentingan BRTPD untuk mencapai kebermanfaatannya terbatas karena kurangnya anggaran, sehingga menghambat pelaksanaan program kedepan. Selain itu keterlibatan BRTPD DIY hanya memberi masukan dan mengikuti program sosialisasi



Gambar 1. Kegiatan pelatihan keterampilan di BRTPD DIY

Sumber : BRTPD DIY

3.1.4 Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Bantul tidak memiliki kepentingan dan pengaruh secara penuh dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Pemerintah kelurahan hanya berkontribusi terlibat dalam mencari data terkait jumlah disabilitas. Data tersebut yang kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk tindak lanjut implementasi program. Kemudian keterlibatan pihak kelurahan juga terdapat pada proses Musrenbangdes untuk menampung saran dari disabilitas, serta diseminasi data dan pelatihan keterampilan. Namun untuk penyelenggara adalah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Dinas Sosial Bantul, dan LSM Ciqal, pemerintah kelurahan hanya bertindak sebagai fasilitator.

3.1.5 LSM Ciqal

Pengaruh LSM Ciqal dalam implementasi kebijakan terlihat pada kewenangan untuk mengadakan pengorganisasian, pelatihan motivasi, pelatihan vokasional, pelatihan manajemen dan kewirausahaan, serta pemagangan bagi disabilitas di Kabupaten Bantul. LSM Ciqal berkontribusi dalam menyelenggarakan pelatihan seperti menjahit, memasak membatik, dan wirausaha bidang perikanan. Program pelatihan yang diselenggarakan Ciqal dilakukan sampai disabilitas bisa bekerja dan mandiri, sehingga jika penyandang disabilitas tidak diterima di perusahaan mereka dapat bekerja sendiri mandiri di rumah. Selain itu LSM Ciqal berkontribusi dalam mendorong dan mengadvokasi hak ketenagakerjaan disabilitas. Kepentingan LSM Ciqal untuk mencapai

kebermanfaatan terbatas karena kurangnya anggaran dalam penyelenggaraan program pelatihan.

3.1.6 Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM)

Memiliki pengaruh berupa kewenangan untuk mempekerjakan dan memberdayakan disabilitas pada bidang pembuatan kerajinan kayu. Kontribusi yang dilakukan YPCM dalam implementasi kebijakan yaitu mewujudkan suasana kerja inklusif. Yaitu dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu terkait kemampuan, waktu pengerjaan dan kondisi kesehatan disabilitas untuk membuat suatu produk. Disamping itu YPCM menyediakan fasilitas dan tempat kerja yang aksesibel. Fasilitas yang aksesibel contohnya *handrail*, *ramp*, serta toilet dan kamar mandi yang ramah disabilitas. Namun YPCM memiliki pengaruh yang rendah untuk menggerakkan pihak lain dalam membina dan meningkatkan kesempatan kerja penyandang disabilitas. Kepentingan YPCM terbatas atau rendah karena tidak terlibat dalam workshop maupun sosialisasi terkait kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja disabilitas

3.1.7 Komunitas Difabelzone

Komunitas Difabelzone memiliki pengaruh berupa kewenangan untuk mempekerjakan dan memberdayakan disabilitas pada bidang pembuatan batik. Kontribusi Difabelzone terlihat dalam pengadaan beberapa program seperti pelatihan menggambar, mencanting, dan mewarnai untuk meningkatkan *skill* disabilitas. Disamping itu Difabelzone membangun pendekatan dengan disabilitas melalui pemberian motivasi dan *sharing session*. Untuk mewujudkan suasana inklusif, Difabelzone memberikan fasilitas dan tempat kerja yang ramah terhadap disabilitas seperti kamar mandi dengan pintu besar yang dapat diakses kursi roda, ruangan kerja yang besar dan bersekat, *handrail*, dan *ramp*. Kepentingan Difabelzone terbatas atau rendah karena jarang terlibat dalam workshop maupun sosialisasi terkait kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja disabilitas.

3.1.8 PT. Busanaremaja Agracipta

Memiliki kewenangan melakukan perekrutan tenaga kerja disabilitas. Namun pengaruh tergolong rendah karena jumlah disabilitas yang diterima masih dibawah aturan kuota satu persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021. PT. Busanaremaja Agracipta baru mempekerjakan 21 pekerja disabilitas atau sekitar 0,51% dari total pekerja. Kepentingan PT Busanaremaja Agracipta termasuk dalam kategori rendah, walaupun telah terlibat dalam proses perekrutan dan mengikuti sosialisasi, namun belum terdapat fasilitas kerja yang ramah terhadap disabilitas., belum tersedia kamar mandi dengan pintu besar yang dapat diakses kursi roda, *handrail*, dan *ramp*. Berikut merupakan data jumlah pekerja disabilitas di perusahaan perusahaan di Bantul, termasuk PT. Busanaremaja Agracipta.

Tabel 2. Perusahaan di Bantul yang mempekerjakan disabilitas

Nama Perusahaan	Jumlah Pekerja	Jumlah Disabilitas	Persentase
PT. Anggun Kreasi Garmen	2302	16	0,70%
PT. Cahaya Mulia Persada Nusa	885	2	0,23%
PT. Busana Remaja Agracipta (Singosaren)	3301	16	0,48%
PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	1403	26	1,85%
PT. Marvel Sports Internasional	709	6	0,85%
CV. Yogya Karya Mandiri	55	1	1,82%
PT. Midi Utama Indonesia	599	15	2,50%
PT. Qhome Sukses Abadi	426	5	1,17%
CV. Asa Mandiri	75	1	1,33%
PT Dong Young Tress Indonesia	2565	6	0,23%
PT Kooc Kreasi	79	1	1,27%
PT. Ide Studio Indonesia	211	1	0,47%
PT. Ameya Living Style	1937	3	0,15%
PT. Busana Remaja Agracipta (Klodran)	4106	21	0,51%
PT. IGP International Kasihan	1911	3	0,16%
CV. Cocoon Asia	85	2	2,35%
Perumda Tirta Projomansari	122	1	0,82%
PT. Pramesthi	2385	21	0,88%
PT. Sinar Kencana Makmur Jaya	491	2	0,41%
CV. Yogya Karya Andini	55	1	1,82%

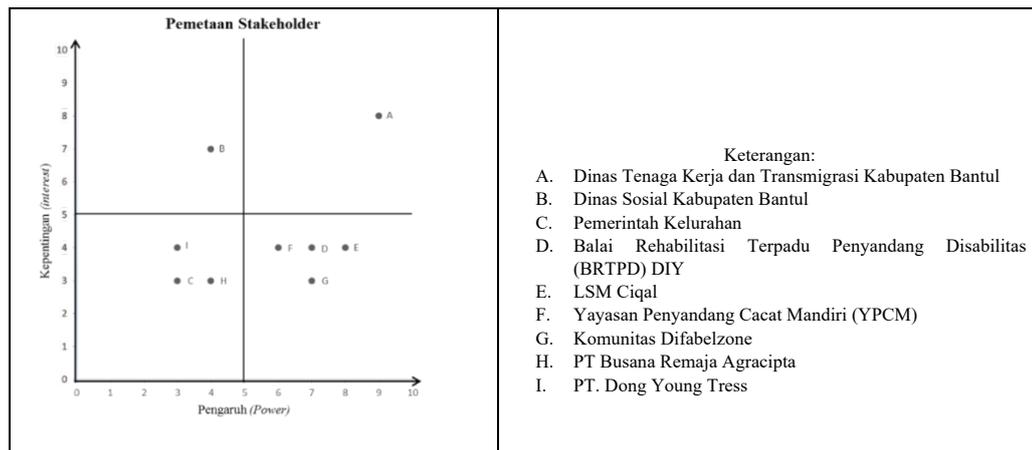
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

3.1.9 PT. Dong Young Tress

Memiliki kewenangan melakukan perekrutan tenaga kerja disabilitas. Namun pengaruh tergolong rendah karena jumlah disabilitas yang diterima masih dibawah aturan kuota satu persen. Kepentingan PT Dong Young Tress termasuk dalam kategori rendah. Walaupun telah terlibat dalam proses perekrutan, namun belum terdapat fasilitas kerja yang ramah terhadap disabilitas. Kemudian posisi kerja yang ditawarkan kurang sesuai dengan kemampuan disabilitas, ketika perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan untuk mengoperasikan mesin jahit namun disabilitas banyak yang belum memiliki keterampilan tersebut. Sehingga banyak disabilitas yang memilih untuk tidak mendaftar pada rekrutmen yang dibuka. Kemudian PT Dong Young Tress juga mengungkapkan bahwa perusahaan belum membangun infrastruktur dan sarana yang ramah disabilitas

3.2 Kategori Stakeholder

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 9 stakeholder yang kemudian dikategorikan menjadi empat berdasarkan *power* dan *interest*. yaitu *key players*, *context setter*, *subject*, dan *crowd*. Berdasarkan teori tersebut, kategori stakeholders dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut



Gambar 2. Pemetaan kategori stakeholder

Sumber : Peneliti, 2023

3.2.1 Key Players

Merupakan stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh tinggi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Disnakertrans Bantul merupakan *key players* karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Disnakertrans Bantul memiliki wewenang untuk menyediakan akses bagi disabilitas untuk masuk ke dunia kerja dan menciptakan perluasan kesempatan kerja yaitu sebagai fasilitator rekrutmen antara perusahaan dan disabilitas. Disnakertrans Bantul memiliki pengaruh untuk mendorong perusahaan/swasta di Kabupaten Bantul untuk mempekerjakan penyandang disabilitas yang dilaksanakan melalui forum komunikasi dan sosialisasi. Serta Disnakertrans Bantul juga memiliki berkontribusi tinggi dalam menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas.

3.2.2 Contest setter

Merupakan stakeholder dengan kepentingan rendah dan pengaruh tinggi yaitu LSM Ciqal, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD), Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM), dan Komunitas Difabelzone. Pengaruh yang tinggi BRTPD DIY dan LSM Ciqal kaitannya adalah dalam melakukan rehabilitasi dan pemberian pelatihan serta mengadvokasi dan menanamkan perspektif agar perusahaan mau memenuhi kuota satu persen pekerja disabilitas. Kemudian stakeholders YPCM dan Difabelzone juga merupakan *contest setter* yang memiliki wewenang untuk memberdayakan disabilitas sekaligus mempekerjakan disabilitas serta memiliki kontribusi untuk mewujudkan suasana kerja inklusif serta melalui penyediaan fasilitas dan tempat kerja yang aksesibel terhadap disabilitas. Namun kepentingan yang dimiliki BRTPD DIY, LSM Ciqal, YPCM, dan Difabelzone termasuk rendah karena tidak terlibat dalam merubah atau mempengaruhi kebijakan yang ada hanya

sebatas memberikan saran atas permasalahan yang ada. Kepentingan yang ada pada keempat stakeholders tersebut tidak bersifat menyeluruh secara langsung mempengaruhi stakeholder lain dalam implementasi kebijakan.

3.2.3 *Subject*

Merupakan stakeholder dengan kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. Stakeholder yang merupakan *subject* yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Kepentingan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Bantul yakni harapan untuk mewujudkan disabilitas yang berdaya melalui rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis/fisik serta keterlibatan dalam pemberian pelayanan jaminan sosial berupa Jamkesmas kepada disabilitas. Sedangkan berdasarkan pengaruhnya, Dinas Sosial Bantul hanya terlibat untuk melakukan pelatihan keterampilan kepada disabilitas namun pelatihan masih bersifat dasar. Dinas Sosial Bantul juga wewenangnya terbatas hanya mengurus bidang jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan rehabilitasi disabilitas sehingga tidak berkontribusi untuk peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas ke sektor perusahaan.

3.2.4 *Crowd*

Merupakan stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh rendah. Stakeholder yang termasuk *crowd* yaitu PT. Busana Remaja Agracipta, PT. Dong Young Tress, dan Pemerintah Kelurahan. Pemerintah kelurahan tidak memiliki kepentingan yang tinggi melainkan hanya sebagai pendukung yang berperan mendata jumlah dan kebutuhan disabilitas. Stakeholders swasta seperti PT. Dong Young Tress dan PT. Busanaremaja Agracipta juga merupakan *crowd*. Kedua stakeholder tersebut secara terbuka memiliki wewenang membuka rekrutmen bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, namun jumlah pekerja disabilitas yang diterima di perusahaan belum memenuhi kuota minimal 1% pekerja penyandang disabilitas yang diatur dalam UU. Kemudian PT. Dong Young Tress dan PT. Busanaremaja Agracipta belum memiliki kontribusi untuk berkontribusi membangun sarana prasarana dan ruangan kerja yang ramah disabilitas.

3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat

3.3.1 Faktor penghambat

- a. Keterbatasan sumberdaya material dan finansial,
Belum terdapat sarana dan fasilitas kerja yang aksesibel terhadap disabilitas serta terdapat keterbatasan anggaran untuk pelatihan keterampilan dan pemberian rehabilitasi kepada disabilitas
- b. Karakteristik organisasi pelaksana
Perusahaan yang berorientasi profit belum mempekerjakan disabilitas karena tidak ingin mengeluarkan tambahan biaya untuk membangun fasilitas yang layak bagi pekerja disabilitas
- c. Disposisi implementor

Sebagian besar pelatihan yang diberikan hanya bersifat dasar, sehingga masih banyak disabilitas yang belum memiliki skill yang mumpuni untuk dapat diterima bekerja.

- d. Komunikasi antar organisasi
Belum ada kesepakatan antara swasta, pemerintah, dan disabilitas mengenai kualifikasi tenaga kerja disabilitas yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen.
- e. Kondisi lingkungan
Terdapat rasa minder dari disabilitas untuk bekerja dan bersaing dengan non disabilitas, dan juga banyak penyandang disabilitas tidak didukung oleh keluarga untuk bekerja

3.3.2 Faktor pendorong

- a. Standar kebijakan berupa peraturan dan regulasi
Telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai tupoksi stakeholders, yaitu pada UU No 8 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2001
- b. SDM yang professional
Dalam implementasi kebijakan, stakeholders dibantu oleh tenaga kerja sosial untuk pendataan disabilitas. Selain itu dalam pemberian rehabilitasi dan pelatihan keterampilan terdapat tenaga profesional dan seseorang ahli dibidangnya
- c. Terjalannya hubungan antar stakeholder
Hubungan yang terjalin berupa kerjasama untuk pelatihan serta koordinasi melalui workshop dan sosialisasi untuk pendataan disabilitas

4. Kesimpulan

Berdasarkan indikator *power* dan *interest*, hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan stakeholders dalam implementasi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Masing-masing stakeholder memiliki pengaruh dan kepentingan dalam implementasi kebijakan seperti memberikan rehabilitasi dan bekal keterampilan bagi disabilitas agar dapat bekerja. Selain itu stakeholders berperan dalam menyediakan lapangan kerja, dan juga mendorong pihak-pihak sektor usaha di Bantul untuk dapat mempekerjakan penyandang disabilitas. Kemudian berdasarkan *power* dan *interest*, stakeholder dikategorikan menjadi empat yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul sebagai *key players*, Dinas Sosial Bantul sebagai *subject*, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY, LSM Ciqal, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM), Komunitas Difabelzone sebagai *contest setter*, serta Pemerintah Kelurahan, PT Busana Remaja Agracipta dan PT. Dong Young Tress sebagai *crowd*. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kebijakan belum mencapai tujuan secara optimal. Faktor penghambat tersebut diantaranya sikap stakeholders dalam implementasi kebijakan yang hanya memberikan pelatihan yang bersifat dasar, keterbatasan sumber daya anggaran, tidak adanya fasilitas ramah disabilitas di perusahaan, serta belum adanya kesepakatan antara pemerintah, swasta, dan penyandang disabilitas mengenai kualifikasi tenaga kerja disabilitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu terdapat

rekomendasi antara lain: meningkatkan peran aktif stakeholders untuk melakukan koordinasi, menguatkan komitmen peran stakeholder sesuai peraturan yang ada mengenai disabilitas di bidang ketenagakerjaan, menyusun standar penyelenggaraan program, menyusun laporan pertanggungjawaban antar stakeholder dalam menjalankan program terkait kebijakan sebagai bahan evaluasi, menyelenggarakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan fasilitas dan ruangan kerja yang ramah terhadap disabilitas serta koordinasi terkait ketentuan kualifikasi rekrutmen

Referensi

- [1] Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, 2022
- [2] Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Data PMKS Disabilitas, 2021
- [3] Republik Indonesia, Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- [4] Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- [5] <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6241379/ribuan-perusahaan-di-bantul-belum-pekerjakan-penyandang-disabilitas>, diakses September 2023
- [6] Mizunoya, S., & Mitra, S. Is There a Disability Gap in Employment Rates in Developing Countries. *World Development*, Volume 42, Number 1, pp. 28–43.
- [7] <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>, diakses September 2023
- [8] Darmawanti, T. K. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Volume 6, Number 2, pp. 161-171.
- [9] Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- [10] Wakka, A. K. Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, Volume 3, Number 1
- [11] Bryson, J. M. What To Do When Stakeholders Matter: Stakeholders Identification And Analysis Techniques. *Public Management Review*, Volume 6, Number 1.
- [12] Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J. & Stringer, L. C. Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, Volume 90, Number (5), pp. 1933-1949.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- [14] Morissan, M, *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta, 2017.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- [16] Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications, America, 2014